



DAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI PUGER KULON TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PUGER KABUPATEN JEMBER

Eko Setiawan
Program Studi Sosiologi, Universitas Brawijaya
Email: oke.setia@gmail.com

Article Info

Keywords:

Impact, Closure of Localization, Socioeconomic, Puger Community

Received 13/01/2023
Accepted 27/05/2023
Available online 10/06/2023

Abstract

Prostitution is a disease of society as old as human life itself cannot be eliminated because it always exists in every age. It is a classic problem because it needs serious government handling in overcoming the problem of prostitution. It is undeniable that it can increase the economic growth of the people around the localization. This research uses qualitative research methods. The data collection method uses observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis using interactive models, including data collection, data reduction, data presentation. The results showed positive and negative views of the community about the existence of localization. The existence of localization will only cause bad impacts and harm people's lives. However, there are those who think that localization can be profitable from an economic point of view. The social impact of the existence of localization interferes with the mental development of children and decreases the level of religiosity. Meanwhile, the economic impact is felt by business actors who depend on their lives in localization areas complaining because income has decreased.

A. PENDAHULUAN

Lokalisasi merupakan tempat praktek transaksi jual beli antara PSK dengan orang yang membutuhkan jasa seksualitas atau biasa dikenal masyarakat sebagai rumah bordil. Lokalisasi adalah pemusatan suatu kegiatan pada wilayah yang terbatas (Daldjoeni, 2011). Sehingga akan menambah fungsi wilayah yang bersangkutan (Pasha, 2016). Jajan di lokalisasi sebuah pilihan rasional bagi para laki-laki yang memiliki libido tinggi yang belum tersalurkan dengan baik.

Menjamurnya lokalisasi di suatu daerah tidak terlepas adanya campur tangan dari pemerintah setempat karena diwajibkan membayar pajak agar kegiatannya dapat berjalan (Purnomo, 2012). Kegiatan prostitusi dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap norma kesusilaan dan melanggar hukum.

Praktek prostitusi (pelacuran) sebagai bentuk penyimpangan dapat ditemukan diseluruh pelosok negeri dari zaman dahulu hingga saat ini. Baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi (Sulistiyaningsih, 2017). Istilah pelacuran sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit (Koentjoro, 2015). Jenis pekerjaan ini setara umur manusia itu sendiri (Bagong, 2013). Praktek prostitusi biasanya berada jauh dari pemukiman warga, dengan berbagai pertimbangan agar lokasinya tidak mudah mudah untuk diakses (Kartono, 2018). Prostitusi atau pelacuran adalah kegiatan memperjualbelikan *sex* di luar pernikahan dengan imbalan upah uang (Truong, 2012). Pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang sebagai transaksi perdagangan (Shadily, 2018). Istilah pelacuran berasal sari bahasa latin, yaitu *pro-stituere* berarti membiarkan diri berbuat zina percabulan (Siregar, 2015). Bisa berarti transaksi penjualan jasa seksual, oral. Sehingga pelacur wanita biasa disebut *sundal, lonte, balon*.

Selain itu, keberadaan lokalisasi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan psikologi anak-anak. Menimbulkan gejala patologis penyakit masyarakat karena melanggar norma susila dan agama. Sehingga menghambat anggota masyarakat dalam mencapai tujuan (Syani, 2012). Lokalisasi dalam pandangan masyarakat sebagai tempat mangkal resmi para PSK yang menjajakan dirinya kepada orang yang membutuhkan dengan menggantungkan hidupnya dengan menunggu para tamu di kompleks lokalisasi (Bachtiar & Purnomo, 2017). Mayoritas tidak keluar dari lingkungan lokalisasi, hanya menunggu tamu yang datang menghampiri dan membutuhkan jasa mereka (Purnami, 2017). Baik di lakukan secara terselubung dan terbuka (Kartono, 2012). Pada umumnya lokalisasi terdiri dari rumah-rumah kecil berlampu kelap-kelip, terdiri dari kursi tamu, tempat tidur dan alat rias (Kartono, 2020).

Pelaku pelacuran dapat hidup berdampingan dengan masyarakat, tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif dan negatif (Issabela & Hendriani, 2010). Menimbulkan penyakit kelamin dan paling utama dapat merusak sendi-sendi kehidupan, moral, susila, hukum, agama. Lingkungan menjadi kurang

kondusif untuk perkembangan psikologi anak, anak menjadi *sex addict*. Banyak anak terjerumus dalam *sex* bebas, hamil di luar nikah dan maraknya peredaran narkoba. Berbagai kasus tertular penyakit seksual yang menular, HIV dan tingginya *trafficking* maupun kriminalitas. *Image* lingkungan lokalisasi yang buruk, mengakibatkan orang yang tinggal di wilayah tersebut sulit mencari pekerjaan (Martono, 2015).

Bertolak belakang dari dampak negatif di atas, masih ada sebagian orang beranggapan dengan berdirinya lokalisasi memberikan penghidupan kepada masyarakat sekitarnya. Antara lain, perputaran ekonomi pedagang kaki lima, warung makan, salon kecantikan, tukang becak, tukang ojek, tukang parkir, calo, mucikarai, pembantu, tukang *laundry*, tukang pijat, penjual jamu. Berbagai profesi dalam kegiatan pelacuran menjadikan area lokalisasi tempat perputaran uang yang melimpah. Saling ketergantungan berbagai sektor, mampu menciptakan mata rantai bisnis lokalisasi tidak mudah diputus begitu saja. Keberadaan lokalisasi berkembang pesat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk maupun urbanisasi dari kota-kota lain.

Kabupaten Jember yang dikenal sebagai kota santri, tidak terlepas dari praktek prostitusi. Keberadaan lokalisasi yang selama ini jadi penompang hidup bagi PSK dan mucikari. Pelacuran merupakan masalah sosial yang selalu ada pada setiap jaman, tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan sehingga bekerja sebagai PSK merupakan salah satu pilihan di tengah himpitan beban perekonomian. Salah satu permasalahan pelacuran terjadi di Kabupaten Jember tepatnya di Dusun Krajan II Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. Meskipun keberadaannya dianggap bermanfaat, disatu sisi lokalisasi tetap bermakna negatif harus segera ditutup. Sehingga menarik peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam yang dituangkan dalam artikel.

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Ambarwati *et al* (2020) terkait dampak ekonomi penutupan lokalisasi bagi masyarakat Semampir Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan, secara ekonomi penutupan lokalisasi berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Semampir menurun mencapai 50%. Penurunan pendapatan hanya dirasakan oleh masyarakat yang bergantung hidup pada lokalisasi. Masalah perekonomian membuat masyarakat memiliki strategi adaptasi aktif dan pasif untuk melanjutkan proses kehidupan. Melalui hasil

pengamatan dari studi pustaka menunjukkan bahwa penelitian di atas hanya menunjukkan dampak ekonomi dari penutupan lokalisasi. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada dampak penutupan lokalisasi tidak hanya ditinjau dari sisi ekonomi saja tetapi sosial juga.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, tidak menggunakan perhitungan angka-angka dalam proses pengumpulan data (Arikunto, 2014). Bertujuan memperoleh gambaran mengenai dampak sosial ekonomi akibat penutupan lokalisasi. Data yang dihimpun berupa tanggapan, pendapat, konsep, uraian dalam mengungkapkan masalah (Nawawi, 2014). Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif berupa kata-kata, teks, gambar, simbol (Kaelan, 2015). Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan yang berkaitan dengan lokalisasi. Kehadiran peneliti sebagai tolak ukur keberhasilan dengan maksud penggalian data secara mendalam dengan bebas hingga data jenuh. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah dan kegunaan (Sugiyono, 2018). Peneliti menjadi instrumen utama, hadir dan menggali data yang akurat terkait lokalisasi. Menangkap berbagai fenomena melalui pengamatan langsung, kemudian menganalisisnya berdasarkan apa yang diamati dari lapangan (Bungin, 2017). Mengamati orang dalam lingkungannya dan berusaha menafsirkan tentang dunia sekitar (Moleong, 2018). Terkait perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Puger setelah penutupan lokalisasi. Masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang sebelumnya sangat bergantung pada lokalisasi Puger Kulon.

Pemilihan lokalisasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan berbagai pertimbangan terkait dampak yang ditimbulkan akibat penutupan Lokalisasi Puger. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Kasiran, 2013). Observasi melalui pengamatan terhadap obyek dengan menggunakan panca indera (Arikunto, 2016). Pengumpulan data dengan menggunakan indera penglihatan (Mardalis, 2017). Melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek yang diteliti yaitu masyarakat Puger di sekitar lokalisasi. Wawancara mendalam berlangsung dengan cara tatap muka dengan informan dan mendengarkan secara seksama (Narbuko, 2017). Wawancara dengan mengajukan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan penelitian (Harun, 2017). Studi dokumentasi berupa proses pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan pribadi informan (Fathoni, 2016). Lebih lanjut proses pengumpulan data,

baik dokumen tertulis, gambar, elektronik (Maryaeni, 2015). Melalui foto, artikel, memo, terkait dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat paska penutupan lokalisasi Puger Kulon.

Analisis data kualitatif adalah proses pemeriksaan dan penginterpretasian non numerik data pengamatan, untuk tujuan menemukan makna dan pola hubungan yang mendasar (Babbie, 2012). Melakukan analisa data melakukan kajian untuk memahami fenomena di lapangan (Iskandar, 2018). Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dalam artian data-data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan selektif sehingga memperoleh suatu kesimpulan umum. Sedangkan alur kegiatan pengolahan data menggunakan model interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data (Puwito, 2015)

C. HASIL DAN DISKUSI

Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi

Keberadaan lokalisasi ditengah masyarakat sering membuat keresahan dan mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat. Lokalisasi acap kali dianggap sebagai penyebab degradasi moral masyarakat, menjadi penyebab timbulnya masalah sosial dan penyakit kotor. Tidak lepas dari realitas sosial maupun kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakanginya. Keberadaan lokalisasi seringkali menimbulkan pro dan kontra, ada yang berpandangan positif dan negatif. Keberadaan lokalisasi hanya akan menimbulkan dampak buruk dan merugikan kehidupan masyarakat. Namun ada yang beranggapan lokalisasi dapat menguntungkan dari sisi ekonomi.

Senada dengan ungkapan DR nama samaran (47 tahun) salah satu tokoh masyarakat yang berpengaruh di Puger. *“Sudah sejak lama keberadaan lokalisasi menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Sebagian masyarakat ada yang merasa diuntungkan, karena dengan keberadaan lokalisasi dapat menambah pemasukan dengan membuka lapangan usaha. Usaha tersebut meliputi, salon, laundry, toko pulsa, toko obat dan kecantikan maupun jasa pijat. Namun ada yang merasa resah dan merasa dirugikan dengan adanya lokalisasi, khususnya para orang tua yang khawatir dengan anak-anaknya. Takut jika anaknya terpengaruh dalam pergaulan bebas dan menirukan kebiasaan para PSK sehingga mempengaruhi perkembangan*

psikologi mereka. Profesi sebagai PSK dianggap sebagai sampah masyarakat, serta dapat menghancurkan rumah tangga”.

Lebih lanjut penuturan informan DT nama samaran (35 tahun), beliau mengungkapkan: *“Keberadaan lokalisasi sebenarnya sangat meresahkan karena banyak kegiatan kemaksiatan dapat menjerumuskan dalam lembah kemaksiatan, dalam agama juga sudah jelas dilarang”.*

Dari zaman dahulu keberadaan lokalisasi sudah menimbulkan pro dan kontra, sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan keberadaan lokalisasi. Tetapi ada beberapa masyarakat yang merasa diuntungkan dengan keberadaan lokalisasi karena dapat mendatangkan rezeki. Keberadaan lokalisasi dapat membuka peluang usaha dan jasa yang dapat memberikan keuntungan dalam bidang perdagangan. Tidak bisa dipungkiri perputaran roda ekonomi di lokalisasi sangat besar. Seperti apa yang diungkapkan oleh ketua RT dengan inisial SD nama samaran (52 tahun), *“berdirinya lokalisasi justru membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, dalam bidang perdagangan. Baik berdagang makanan kecil maupun warung makan. Warga juga dapat menyewakan rumah mereka untuk tempat kost para PSK yang tidak tinggal di komplek lokalisasi. Sehingga dapat memberikan kesempatan warga untuk mendapatkan uang tambahan. Namun disisi lain keberadaan lokalisasi menimbulkan dampak negatif termasuk menyangkut nama baik Desa Puger, sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.*

Setuju atau tidak, faktanya keberadaan lokalisasi Puger memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar karena mampu mengambil kesempatan dengan mengais rezeki dalam bidang usaha. Keberadaan lokalisasi Puger Kulon meresahkan dan dilakukan penutupan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/39/012/2007 merupakan bentuk kekhawatiran terhadap berbagai persoalan yang diakibatkan oleh lokalisasi. Penutupan lokalisasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Banyak kalangan yang menilai penutupan lokalisasi hanya pencapaian program Pemda Jember, tanpa mempertimbangkan akar permasalahan sebenarnya. Yaitu lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja, sehingga tidak akan menyelesaikan masalah hanya dengan menutup lokalisasi.

Bahkan ketidakmampuan *soft skill* dari para PSK dalam bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tentu akan menyebabkan kegagalan pencapaian kebijakan positif program ini. Selain menutup mata pencaharian PSK, para pemilik usaha dan pedagang makanan di sekitar lokalisasi juga merasakan dampak sepi pembeli sehingga harus menutup usaha secara perlahan. Pemberian kompensasi dan keahlian tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Jember dinilai tidak menyelesaikan persoalan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan mantan PSK ini akan kembali menekuni profesi lamanya dan menjadi tidak terkontrol akibat tidak ada tempat mangkal yang legal. Sehingga kejangkitan penyakit HIV/AIDS di masa mendatang jauh lebih banyak. Penutupan lokalisasi tidak hanya memberikan dampak bagi masyarakat Jember secara umum, tetapi juga para pemain di lokalisasi. Penyelesaian masalah sosial, peningkatan perekonomian masyarakat, penataan tata ruang kota, hingga penurunan masalah kesehatan reproduksi dalam beberapa tahun dapat tercapai bila kebijakan pemerintah ini dapat terealisasi.

Penutupan lokalisasi Puger membawa konsekuensi tersendiri, yaitu maraknya praktik prostitusi liar. Sedangkan Pemkab Jember belum dapat mengantisipasi dampak penutupan lokalisasi tersebut. Sementara para mucikari keukeuh bertahan di lokalisasi Puger. Mereka sadar bahwa tanah yang mereka gunakan untuk penyewaan kamar bagi para PSK itu adalah tanah negara. Mereka beralasan penempatan lokalisasi di Puger pada awalnya karena kebijakan dari Pemkab Jember sendiri. Kontroversi penutupan lokalisasi berdampak bagi mereka yang mengais rezeki dari kawasan tersebut. Banyak yang menggantungkan hidup di sekitar lokalisasi. Sebelum penutupan lokalisasi, ekonomi mereka dapat terangkat, banyak kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Meskipun mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan, namun sampingan bekerja di daerah lokalisasi menjadi lahan yang basah. Banyak masyarakat sekitar bergantung hidupnya pada lokalisasi, maka akan merasakan dampak akibat penutupan lokalisasi. Harus disadari bahwa prostitusi terbangun karena logika bisnis, yaitu adanya *supply and demand*. Di mana para PSK membutuhkan uang dan pelanggannya membutuhkan kepuasan seksual (Retnaningsih, 2009). Para PSK tetap dapat beroperasi selama masih ada pelanggan yang menginginkan jasanya, meskipun harus bekerja di luar wilayah Puger.

Eksistensi prostitusi akan hilang secara perlahan jika tidak ada pengunjung yang datang karena manfaatnya lebih sedikit daripada mudharatnya lebih besar.

Dampak Penutupan Lokalisasi Puger Kulon

Setiap pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi, membuat panik beberapa orang yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi. Sebagian ada yang memilih berhenti dengan memulai babak baru dengan membuka usaha lain. Meskipun dilarang, ada juga yang masih bertahan membuka usaha dengan cara sembunyi-sembunyi dari kejaran aparat. Pencapaian program pemerintah daerah setempat dalam penutupan lokalisasi tanpa mempertimbangkan akar permasalahan sebenarnya. Lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan angkatan kerja, sehingga tidak akan pernah usai hanya dengan menutup lokalisasi. Bahkan ketidakmampuan PSK dalam bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakibatkan kegagalan dari kebijakan ini.

Selain menutup mata pencarian PSK, para pemilik usaha dalam bidang sosial ekonomi di sekitar lokalisasi juga berdampak sehingga harus menutup usahanya karena sepi pembeli. Pertanggungjawaban pemerintah daerah dengan memberikan kompensasi dan keahlian tambahan dirasa tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga mereka. Tidak dipungkiri para mantan PSK Puger Kulon kembali menekuni profesi lamanya secara liar di tempat pelacuran baru sehingga menjadi tidak terkontrol, disebabkan tidak ada tempat mangkal yang resmi. Konsekuensi dari penutupan lokalisasi oleh Pemerintah Daerah Kota Jember, ternyata membawa konsekuensi munculnya praktik prostitusi liar. Sementara pemerintah setempat belum siap mengantisipasi dampak penutupan lokalisasi. Pada umumnya situasi berubah setelah penutupan lokalisasi, para PSK tidak beralih profesi melainkan hanya berpindah ke daerah lain. Banyak berpindah ke lokasi baru melakukan secara *illegal* di jalanan, tempat pijat, warung remang-remang.

Meskipun lokalisasi telah ditutup oleh pemerintah daerah setempat, namun tidak sedikit para PSK melakukan kegiatan prostitusi secara *illegal* dan sembunyi-sembunyi. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan bukan pembinasaan. Selama ini faktor utama tumbuhnya kawasan prostitusi seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi. Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan cara yang benar inilah yang perlu dikembangkan dalam prioritas programnya. Bisnis seks terselubung seperti cewek orderan, panti pijat esek-esek, dan cafe yang menyediakan layanan seks, saat ini berkembang.

Kegiatan prostitusi secara *illegal* tidak mudah dideteksi sehingga program kesehatan kesulitan menjangkaunya. Inilah masalah perilaku yang perlu dibenahi. Meskipun tidak mudah merubah perilaku masyarakat, namun perlu upaya pembinaan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Penutupan lokalisasi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial meliputi, kesehatan, keamanan, keagamaan, pendidikan masyarakat. Keberadaan lokalisasi mengganggu perkembangan mental anak-anak dan menurunnya tingkat religiusitas. Keberadaan lokalisasi menimbulkan citra buruk bagi Kota Jember yang religius. Sedangkan dampak ekonomi akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh para pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di daerah lokalisasi mengeluh karena pendapatan menurun.

Sebagaimana penuturan Kepala Desa, *pasca penutupan lokalisasi memberikan positif berupa kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi kebisingan dentuman suara musik. Meskipun ada sebageian warga yang merasa dirugikan atas penutupan lokalisasi sehingga tidak dapat berjualan. Langkah pemerintah harus diapresiasi dalam memerperbaiki generasi muda. Penutupan lokalisasi menjadi tonggak sejarah, ada hikmah tersembunyi yang dapat diambil pelajaran bahwa memperjuangkan moral positif membutuhkan usaha yang besar.*

Dampak utama penutupan lokalisasi terhadap para PSK dan masyarakat yang membuka usaha berharap agar pemerintah setempat menjamin pekerjaan yang layak. Pemberian uang sebagai kompensasi dianggap sebagai solusi untuk modal usaha. Kenyataannya, besarnya kompensasi tersebut masih jauh dari kenyataan. Besarnya uang kompensasi tidak dapat dipakai untuk usaha dalam jangka waktu lebih dari setahun. Ada beberapa mantan PSK yang beralih profesi dengan bekerja di perusahaan, namun pada umumnya hanya bertahan satu tahun sesuai kontrak. Dengan demikian, pemberian uang kompensasi dengan harapan dapat memperpanjang hidup lebih lama tanpa disertai solusi dalam menekan angka kemiskinan.

D. KESIMPULAN

Keberadaan lokalisasi Puger seringkali menimbulkan pro dan kontra, ada yang berpandangan positif dan negatif. Keberadaan lokalisasi hanya akan menimbulkan dampak buruk dan merugikan kehidupan masyarakat. Namun ada yang beranggapan lokalisasi dapat menguntungkan dari sisi ekonomi karena besarnya arus perputaran uang. Baik bagi warga sekitar, hasil pungutan pajak,

mucikari, dan PSK sendiri. Penutupan lokalisasi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial meliputi, kesehatan, keamanan, keagamaan, pendidikan masyarakat. Keberadaan lokalisasi mengganggu perkembangan mental anak-anak dan menurunnya tingkat religiusitas. Keberadaan lokalisasi menimbulkan citra buruk bagi Kota Jember yang religius. Sedangkan dampak ekonomi akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh para pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di daerah lokalisasi mengeluh karena pendapatan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Dyah Arum., Eskasasnanda, I Dewa Putu., Purnomo, Agus., Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*. Vol. 9, No. 2, Oktober 2020.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbie, E. (2012). *The Basics of Social Research*. Belmont. CA: Wadsworth.
- Bachtiar, R., & Purnomo, E. (2017). *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus.
- Bagong, Suyatno. (2013). *Anak Perempuan yang dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Daldjoeni. (2011). *Pokok-Pokok Geografi Manusia*. Bandung: Alumi.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2016). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harun, Rohajat. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Kualitatif*. Bandung: Madar.
- Iskandar. (2018). *Metodologi Penelitian, dan Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Issabela, N., & Hendriani, W. (2010). Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari. *Jurnal Insan*, 10-22.
- Kaelan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartono, Kartini. (2012). *Social Jilid 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. (2018). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kartono, Kartono. (2020). Patologi Sosial Jilid II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasiran, Moh. (2013). Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian. Malang: UIN Press.
- Koentjoro. (2015). On The Spot: Tutar Dari Sang Pelacur. Yogyakarta: Tinta.
- Martono, Nanang. (2015). Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Post Modern dan Pos Kolonial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. (2017). Metodologi Pendekatan Suatu Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryaeni. (2015). Metode Penelitian Kebudayaan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. (2014). Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: Rineksa Cipta.
- Pasha. (2016). Tinjauan Perkembangan Ekonomi: Pertumbuhan Melambat Terus Berlanjut. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnami, Ari. (2017). Pornografi dalam Perspektif Wanita Seksualitas. Jakarta: Sinar Harapan.
- Purnomo, Tjahjo. (2012). Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya. Surabaya: Grafity Pers.
- Puwito. (2015). Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Retnaningsih, Hartini. Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/2014 (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009)
- Shadily, H. (2018). Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus. Jakarta: Ichtiar Van Houve.
- Siregar, K. (2015). Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. Medan : Perdana Mitra Handalan.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsini, Arikunto. (2014). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineksa Cipta.
- Sulistiyaningsih. (2017). Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syani, A. (2012). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Truong, Thanh-Dam. (2012). Seks, Uang dan Kekuasaan. Jakarta: LP3ES.